



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUZAKIR
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 505742

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.350.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 583 m2/583 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 870.000.000		
2. Tanah Seluas 60000 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, WARISAN Rp. 355.000.000		
3. Tanah Seluas 40000 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, WARISAN Rp. 230.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m2/12 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 895.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	217.100.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000		
2. MOBIL, SUZUKI JIMNY KATANA Tahun 1997, HIBAH TANPA AKTA Rp. 50.000.000		
3. MOBIL, HONDA HONDA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	106.220.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	102.710.225
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.776.030.225



III. HUTANG

Rp. 123.444.049

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.652.586.176

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.